

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 018 /A/JA/ 03/2009

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang Penanganan Tindak Pidana Perikanan, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2009;
 - bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
 - c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
- 2. Undang-undang tentang Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
- Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: MOU.01/DJ-P2SDKP/IV/07, Nomor: B-515/C/04/2007 tanggal 3 April 2007 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan;
- Peratutan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
- 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2009, tanggal 31 Desember 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2009.

PERTAMA

: Tempat dan penyelenggaraan Diklat

- Diklat diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Penyelenggara Diklat adalah Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA

: Peserta Diklat

- Peserta Diklat adalah para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk mengikuti Diklat yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
- Jumlah peserta sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA

: Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Meningkatkan penguasaan, kemampuan dan keterampilan Jaksa dalam bidang Penanganan Tindak Pidana Perikanan.

B. Sasaran

Tersedianya tenaga Jaksa yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menangani serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang Penanganan Tindak Pidana Perikanan.

KEEMPAT

: Kurikulum dan Tenaga Pengajar

- Jumlah kurikulum / mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I.
- 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran

KELIMA

: Jangka Waktu Diklat

- 1. Diklat diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
- 2. Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan dimulai pada tanggal 2 April 2009 dan akan ditutup pada tanggal 15 April 2009.
- Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi,siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
- 4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

KEENAM

Penilaian dan Penghargaan

- Selama mengikuti Diklat terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan integritas yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
- Kepada mereka yang telah selesai mengikuti Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

KETUJUH

Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2009 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

KEDELAPAN

Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Perikanan Tahun 2009.

KESEMBILAN

: Penutup

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
- 2. Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
- 3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- 4. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
- 5. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
- 6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
- 7. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
- 8. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
- 9. Arsip.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

30 Maret

2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI

LAMPIRAN PERATURAN JAKSA AGUNG RI. :PER- 018/A/JA/ 03/2009

Nomor Tanggal

: 30 Maret

2009

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN TAHUN 2009 14 HARI = 96 JAM PELAJARAN

		14 HARI = 96 JAM PEL		RI	NCIAN JAM		11.184
0.	NAMA PELAJARAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUM LAH
0.			4	5	6	7	8
1	2	3					
1	KELOMPOK WAWASAN						0
		Distant Dorikonan	7	-	-	2	9
1.	Pengelolaan Perikanan	Dirjen Perikanan				2	9
	Budidaya dan Tangkap Pengawasan Sumber	Direktur WASDAL SDP	7	-	-	_	
2.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan	(Departemen Kelautan	7	_	-	2	9
3.	Pengawasan dan	dan Perikanan)					
	Pengendalian Sumber	Direktur SDK (Departemen Kelautan					
	Daya Kelautan	dan Perikanan)					
11	KELOMPOK TINDAK PID	KELOMPOK TINDAK PIDANA PERIKANAN					
"			7	_	_	2	9
1.	Penanganan Tindak	Direktur Penanganan Pelanggan (Departemen	'				
	Pidana Perikanan	D-vilconon)					
	UU No.31/ 2004 tentang					2	9
2.	Perikanan UU No.16/ 1992 tentang	Kampus Karantina		-			
۷.	Karantina Hewan, Ikan	(Depatemen Roladian					
	dan Tumbuhan						
	dihubungkan dengan PF						
	No.82/ 2000 tentang Karantina Hewan, pr	대명 시간 하는 사람들이 보고 있는데 한 경기를 하면 하다 때문에 가장 하는데 되었다.					
	No.14/2002 tentang						12
	Karantina Tumbuhan	t Adnan Paslyadja, SH	7	3	-	2	12
3.	Teknik Pembuatan Sura						
	Dakwaan dai Pembuktiannya		7	_		2	9
4.	Hukum Laut Internasiona	Susanto, SH	7 7	3	-	2	12
5.	Studi Kasus Tinda	k Hasan Madani, SH				2	9
	Pidana Perikanan	n Amin Birawa, SH	7	-	-	2	
6.	Pelaksanaan Putusa Pengadilan		7		_	2	9
7.		Yushar Yahya, SH	'				
		INC					
111	KELOMPOK PENDUKU	ING					_
	Dengamanan da	an Paket (tidak termasu	ık -	-	-		
1	Pengamanan da Penggunaan senjata a	pi dalam jam pelajaran)					
	laras pendek/ lar	as Tim PASKHAS IN A	U				
	panjang.	dan Penyelenggara.					
-	/ CERAMAH						
1	VERAWATI						
1	. Ceramah Kapusdiklat	Kejaksaan	R.I.				
	Ceramah Karantina	Departemen Kelaut dan Perikanan	all				
	O mark lam Dideus	Jam Pidsus					
1	3. Ceramah Jam Pidsus	oun rises				20	9
-	IIIN	ILAH TOTAL	70	6	-	20	, ,

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN PARAF TANGG/ PEJABAT No. Sesjam Bin Kapus Diklat Kabid Kasubbid 11-03-109 Pelaksana 11-03-09 -mgetik

7 9, JAKSA-AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI